

DAFTAR ISI

	halaman	
ABSTRAK.....	i	
ABSTRACT	ii	
KATA PENGANTAR	iii	
DAFTAR ISI	iv	
DAFTAR TABEL	vii	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang Penelitian	1	
B. Identifikasi Masalah	18	
C. Tujuan Penelitian	19	
D. Kegunaan Penelitian	19	
E. Kerangka Pemikiran	20	
F. Metode Penelitian	43	
BAB II INVESTASI DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN EKONOMI, GLOBALISASI, DAN OTONOMI DAERAH		50
A. Hukum, Ekonomi dan Investasi		
1. Implementasi Konsep Negara Hukum Dan Negara Kesejahteraan	50	
2. Peranan Hukum Dan Pembangunan Ekonomi	62	
3. Kaitan Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi	75	
4. Aspek Globalisasi Dan Daya Saing	83	
5. Kepastian Hukum dan Aspek Birokratisasi Dalam Pengaturan Investasi	92	
B. Globalisasi Kaitannya Dengan Hukum Investasi		
1. Implikasi Kesepakatan Internasional Dalam GATT-WTO, AFTA, APEC Bagi Kegiatan Investasi dan Hukum Nasional	101	

2. Masalah Hambatan Investasi dalam Pengaturan TRIM's	119
3. Jaminan Investasi dalam Kontek MIGA dan ICSID	126
4. Dampak Globalisasi Bagi Pengaturan Hukum Investasi dalam Hukum Nasional	139
C. Aspek Otonomi Daerah	142
1. Latar Belakang dan Tujuan Otonomi Daerah	142
2. Landasan Filosofis Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Peran serta Masyarakat Dalam Pembangunan	149
3. Struktur Kewenangan Dalam Otonomi Daerah	154
BAB III INVESTASI DAN OTONOMI DAERAH	159
A. Kebijakan Investasi Dalam Pengaturan Hukum Nasional	
1. Sejarah Kelembagaan Investasi	150
2. Kebijakan Kegiatan Investasi Di Indonesia	163
a. Kebijakan Nasional	163
b. Kebijakan Tingkat Regional Jawa Barat	181
3. Sistem Hukum Investasi	184
a, Struktur Kelembagaan Investasi	189
b. Substansi Pengaturan Investasi	202
c. Kultur Kegiatan Investasi	224
B. Masalah Investasi Dalam Otonomi Daerah	
1. Persoalan Peraturan Daerah Yang Berorientasi Pada Pendapatan Asli Daerah	206
2. Pengaturan Prosedural dan Perizinan Investasi Dalam Kaitannya dengan Kepastian Hukum Berinvestasi	214
3. Kewenangan Pemberian Izin Investasi	234
4. Masalah Penciptaan Lapangan Kerja Kaitannya Dengan	

Aturan Hukum Ketenagakerjaan	241
BAB IV KONSEP PENYEDERHANAAN SISTEM HUKUM INVESTASI MELALUI PENYEDERHANAAN PROSEDUR INVESTASI	
A. Kepastian dan Perlindungan Hukum Investor Dalam Sistem Hukum Nasional dan Dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia	248
B. Harmonisasi hukum investasi di Indonesia dengan percaturan global Dan Penciptaan Iklim Investasi yang kondusif	264
C. Pranata Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum Investasi Dan Meningkatkan Daya Saing Untuk Mewujudkan Sistem Investasi Yang Kompetitif Dan Kondusif Dalam Perspektif Otonomi Daerah	313
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	353
A. Kesimpulan	353
B. Rekomendasi	354
DAFTAR PUSTAKA	356
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	363

DAFTAR TABEL

	halaman
TABEL 1 : Porsi Biaya Pada Kelompok Industri.....	9
TABEL 2 : Kebutuhan Investasi nasional Dalam Pertumbuhan Ekonomi	81
TABEL 3 : Perbandingan Peringkat Kemudahan Berusaha Dari 155 Negara Yang Di Survai oleh World Bank	89
TABEL 4 : Penyebaran Investasi Dan Jumlah Proyek Di Jawa Barat	183
TABEL 5 : Bentuk Kelembagaan Investasi Di daerah Pasca Undang-undang No. 22 Tahun 1999	187
TABEL 6 : Pengurusan Izin Di Daerah	228
TABEL 7 : Pengurusan Waktu Memulai Berusaha	228
TABEL 8 : Bentuk Kelembagaan Investasi Di Daerah Pasca Keputusan Presiden 29 Tahun 2004	238
TABEL 9 : Pungutan/Sumbangan Saat Pendirian Pabrik Ke Instansi Yang Menanganinya	269
TABEL 10 : Pungutan/Sumbangan Selama Pabrik Beroperasi	269
TABEL 11 : Jenis-jenis Izin dan Biaya Izin	270
TABEL 12 : Perkembangan Persetujuan Investasi	284
TABEL 13 : Perkembangan Realisasi Investasi (IUT) Antara Tahun 1990 – 2005	285
TABEL 14 : Nilai Investasi Dalam Rangka PMDN dan PMA di Jawa Barat Tahun 1994-2000	290